

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

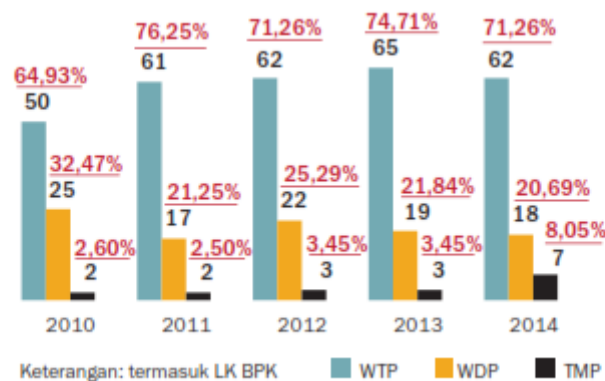
Pemerintah sebagai organisasi publik memiliki tugas untuk menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat. Agar pemerintah dapat melaksanakan tugas tersebut, pemerintah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan anggaran. Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Laporan keuangan juga digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan maka laporan keuangan harus disajikan tepat waktu dan dapat diandalkan. Selain itu laporan keuangan juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan. Menurut Mahmudi (2007b, hlm. 3) dengan adanya laporan keuangan berarti pemerintah telah melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemerintah berupaya untuk terus menerus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Upaya tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga yang dievaluasi melalui opini atas laporan keuangan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Agus Suprijanto selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan bahwa dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kompleksitas transaksi Pemerintah, maka dibutuhkan pengelolaan keuangan yang semakin berkualitas. Pengelolaan keuangan yang berkualitas tercermin dari kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan yang terbaik ditunjukkan

dengan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (perbendaharaan.go.id diakses 13/1/2016).

Pemerintah telah menetapkan target opini WTP atas 81 LKKL pada tahun 2014 atau 98% dari 83 LKKL (BPK, 2015). Namun faktanya perolehan opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan kementerian/lembaga tahun 2014 menyebutkan perolehan opini sejumlah kementerian/lembaga (K/L) mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 jumlah kementerian yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 65 K/L. Namun kini kementerian yang mendapat opini WTP hanya 62 kementerian. Selain itu juga pada tahun 2014 terdapat tujuh kementerian yang mendapatkan opini *disclaimer* dari BPK yaitu Badan Informasi Geospasial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Komunikasi dan Informatika, LPP RRI, LPP TVRI dan Ombudsman RI (Warta BPK, 2015). Perkembangan opini LKKL dan LK BUN dalam 5 tahun terakhir (2010-2014) disajikan pada Grafik 1.1.

Grafik 1.1 Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2010-2014



Sumber : IHPS BPK Semester 1 2015

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa target kualitas laporan keuangan yang harus mendapat opini dari BPK RI berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sulit dicapai oleh sebagian kementerian dan lembaga. Penelitian Milal (2013) menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan belum tercapainya opini WTP secara penuh adalah masih adanya beberapa

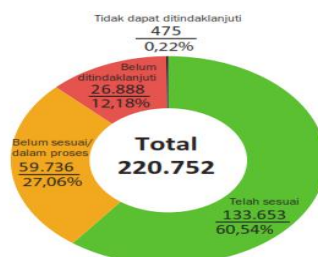
Fera Tresnawati, 2016

PENGARUH TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Mustikarini & Fitriyanti (2012) mengemukakan bahwa temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hilmi & Martani (2012) menemukan bahwa jumlah temuan BPK dalam audit LKPD berhubungan tidak signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan. Jumlah temuan audit BPK ternyata tidak mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan lebih besar. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Liestiani (2008) bahwa jumlah temuan berhubungan positif terhadap tingkat pengungkapan.

Selain itu, rendahnya kualitas laporan keuangan disebabkan oleh rendahnya jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga. Selama 2010-2014 jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi baru menunjukkan 60,54% dibandingkan dengan status lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa entitas yang diperiksa belum memperhatikan hasil pemeriksaan BPK. Hasil penelitian Sari, Martani & Setyaningrum (2015) menunjukkan semakin banyak rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan K/L yang direpresentasikan dari tingkat pengungkapan yang tinggi. Apabila rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pejabat yang diperiksa sesuai dengan rekomendasi BPK, diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian/Lembaga (BPK, 2015).

Grafik 1.2 Perkembangan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2010-2014



Sumber : IHPS BPK Semester 1 2015

Fera Tresnawati, 2016

PENGARUH TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dengan menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK, maka kementerian dan lembaga dapat memperbaiki temuan-temuan periode sebelumnya sehingga mengurangi temuan-temuan pada periode selanjutnya. Semakin besar presentase rekomendasi yang ditindaklanjuti, semakin tinggi peluang mendapatkan opini WTP. Penelitian di Cina yang dilakukan oleh, Huang dan Wang (2010) menemukan bahwa upaya *auditee* atau pihak terkait lainnya dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Di Indonesia penelitian Winanti (2014) dan Setyaningrum (2015) yang menemukan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap opini audit. Semakin banyak tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan maka pengelolaan keuangan menjadi semakin baik sehingga opini yang diperoleh pada periode selanjutnya semakin baik (Setyaningrum, 2015). Berbeda dengan Agusti (2014) dan Nurdiono, dkk. (2015) menemukan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap opini.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan sangat penting dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu penelitian ini akan menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak meneliti laporan keuangan pemerintah daerah, penelitian ini akan meneliti kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga. Penelitian merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sari, Martani & Setyaningrum (2015). Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LHP LKKL) untuk mendapatkan opini audit sebagai ukuran kualitas laporan keuangan. Sampel yang digunakan pun lebih besar meliputi seluruh Kementerian/ Lembaga yang berjumlah 86 Kementerian/ Lembaga sehingga diharapkan mampu melengkapi penelitian terdahulu. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini berjudul **Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Kementerian/Lembaga).**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kualitas laporan keuangan ?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengungkapan laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Bagaimana pengaruh tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kualitas laporan keuangan dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan sebagai variabel *moderating*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kualitas laporan keuangan;
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengungkapan laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan;
3. Untuk mengetahui pengaruh tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kualitas laporan keuangan dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan sebagai variabel *moderating*;

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, adapun kegunaan penelitian ini diharapkan sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menguji secara empiris terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang selama ini masih menimbulkan perbedaan hasil penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan pengetahuan baru dalam ilmu akuntansi, khususnya kualitas laporan keuangan

pada sektor publik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Kementerian/Lembaga, penelitian ini diharapkan menjadi suatu kebijakan bagi pemerintah dalam mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi upaya perbaikan pengelolaan keuangan negara, dapat menjadi pertimbangan upaya terbaik yang harus menjadi prioritas agar pengelolaan keuangan negara semakin baik.
2. Bagi Pemerintah peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian/Lembaga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan memberikan kontribusi untuk perbaikan opini LKPP.
3. Bagi para praktisi di sektor pemerintah, hasil temuan ini dapat memberikan masukan tentang program-program yang dapat dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas laporan keuangan.